

**KINERJA KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN, DAN
KEUANGAN PERIODE 2024-2025**

SKRIPSI

Oleh:

PIPIT SETYORINI

NIM: 24.11.233542



PROGAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

TAHUN 2026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah Skripsi ini kami persembahkan teruntuk:

Keluarga yang kami cintai, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tulus kepada kami didalam setiap langkah prosesnya. Sehingga kami dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan penulisan karya tulis ilmiah Skripsi ini dengan baik.

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, terkhususkan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, yang senantiasa menjadi Program Studi yang unggul di Kalimantan pada bidang administrasi publik yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.

Secara keseluruhan teruntuk Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Akademisi, Masyarakat luas, stakeholder terkait, dan serta rekan-rekan angkatan seperjuangan. Besar harapan kami agar karya tulis ilmiah Skripsi ini dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan daya manfaat dan guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, khususnya dalam bidang Administrasi Publik saat ini dan di masa yang akan datang.

Dengan penuh hormat:

Almamater Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya beserta seluruh Civitas Akademika.

RIWAYAT HIDUP

Pipit Setyorini lahir di Palembang pada tanggal 20 Juli 1979

Pengalaman Studi

Menempuh pendidikan D-III pada 2001

Pengalaman Profesional

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2029.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah Skripsi yang berjudul “*Analisis Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan*”. Dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah Skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
2. Rachmat Hidayat, M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
3. Sholahuddin Shoum Abdurrohman, S.Sos., M.A.P, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
4. Anggelina Hariyanti, S.Sos., M.A.P. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan terbaik untuk Skripsi penulis.
5. Dosen Pengajar pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
6. Pengelola dan Staf Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah Skripsi ini, penulis tentu menyadari akan satu atau lebih kekurangan yang dimiliki, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan masukan yang konstruktif dan membangun. Semoga karya tulis ilmiah Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

RINGKASAN

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan secara keseluruhan telah menunjukkan kinerja yang optimal, terefleksikan dari Kualitas (*Quality*) kinerja yang relevan, profesional, dan sesuai ketentuan; Kuantitas (*Quantity*) kinerja yang dihasilkan memenuhi capaian jumlah dan volume kinerja yang ditetapkan; Pelaksanaan Tugas (*Execution of Tasks*) yang diselesaikan secara berkelanjutan; serta Tanggung Jawab (*Responsibility*) yang diberikan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan ini didorong oleh faktor kemampuan anggota yang memiliki kompetensi dan latar belakang yang beragam, dukungan Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli, dukungan dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, adanya motivasi kerja yang tinggi, serta lingkungan kerja yang kolaboratif dan harmonis antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Meskipun demikian, masih terdapat hambatan pada aspek dukungan organisasi (*Organizational Support*). Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah prioritas perbaikan harus difokuskan pada penguatan dukungan organisasi (*Organizational Support*), dengan Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi secara internal antar bagian di Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Tengah, agar dukungan dan fasilitasi yang diberikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan khususnya Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat optimal baik secara administratif maupun teknis.

Kata Kunci: Kinerja, Komisi I, DPRD, Provinsi Kalimantan Tengah.

SUMMARY

This paper aims to explain the performance of Commission I of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Central Kalimantan Province in the fields of Law, Governance, and Finance. The research used a descriptive qualitative approach. Data collection methods utilized interviews and documentation. The results of the research indicate that the performance of Commission I of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Central Kalimantan Province in the Legal, Government, and Financial Fields as a whole has shown optimal performance, reflected in the Quality of relevant, professional, and compliant performance; Quantity of performance produced meets the achievement of the number and volume of performance set; Execution of Tasks completed sustainably; and responsibility given consistently in every implementation of the duties and functions of Commission I of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Central Kalimantan Province. This success is driven by the ability of members who have diverse competencies and backgrounds, the support of the Expert Group/Expert Staff, the support and facilitation of the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial DPRD, the existence of high work motivation, and a collaborative and harmonious work environment between the Council's Completeness Tools (AKD). However, there are still obstacles in the aspect of organizational support. The suggestion from the results of this study is that the priority for improvement should be focused on strengthening organizational support, with the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial Council being able to strengthen internal coordination and communication between sections in the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial Council, so that the support and facilitation provided to the Central Kalimantan Provincial DPRD, and in particular Commission I of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Central Kalimantan Province, can be optimal both administratively and technically.

Keywords: Performance, Commission I, Regional People's Representative Council (DPRD), Central Kalimantan Province.

KATA PENGANTAR

Assallamu'allaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan.

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Karya tulis ilmiah Skripsi ini merupakan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik. Dalam prosesnya penyelesaian karya tulis ilmiah Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah Skripsi ini, penulis tentu menyadari akan satu atau lebih hal yang menjadi kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah Skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat berharap saran dan masukan yang konstruktif dan membangun demi penyempurnaan dan perbaikan penelitian ini dimasa yang akan datang. Semoga karya tulis ilmiah Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palangka Raya, 15 April 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6

1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Kinerja.....	13
2.2.2 Pengukuran Kinerja.....	16
2.2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20
2.2.4 Alat Kelengkapan Dewan.....	21
2.2.5 Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.....	23
2.3 Kerangka Berpikir	27
2.4 Definsi Konsepsional	27
2.5 Definisi Operasional	28
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Jenis Data	31
3.3.1 Data Primer	32
3.3.2 Data Sekunder	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34

3.5.1 Wawancara	34
3.5.2 Dokumentasi	36
3.6 Unit Analisis Data	36
3.7 Teknik Pengambilan Sampel/Narasumber	37
3.8 Teknik Analisis Data	38
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Deskripsi Objek	42
4.1.1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.....	42
4.1.2 Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	50
4.2 Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan	53
4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.....	80
4.3 Pembahasan	89
 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL PENELITIAN	102
6.1 Kesimpulan	102
6.1 Rekomendasi	106
 DAFTAR PUSTAKA.....	107
 LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kajian Pustaka	10
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	31
Tabel 3.2	Data Primer Penelitian	32
Tabel 3.3	Data Sekunder Penelitian	33
Tabel 3.4	Informan Kunci (<i>Key Informan</i>)	35
Tabel 3.5	Unit Analisis Data	37
Tabel 4.1	Personalia Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2029	51
Tabel 4.2	Mitra Kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	52
Tabel 4.3	Latar Belakang Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2029	55
Tabel 4.4	Dukungan dan Fasilitas dalam Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2029	56
Tabel 4.5.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dihasilkan pada Tahun 2024-2025	63
Tabel 4.6.	Pengawasan melalui Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2024-2025	65
Tabel 4.7.	Reses Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2024-2025	66

Tabel 4.8.	Kegiatan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2024-2025	67
Tabel 4.9.	Kegiatan dalam Bidang Keuangan terkait APBD di Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2024-2025	70
Tabel 4.10.	Dukungan Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli dalam Pelaksanaan Tugas Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2029	74
Tabel 4.11.	Advokasi Hukum melalui RDP) pada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2024-2025	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berpikir	27
Gambar 3.1.	Penjelasan Proses Analisis Data Interaktif dalam Penelitian	38

DAFTAR SINGKATAN

AKD	:	Alat Kelengkapan Dewan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BIMTEK	:	Bimbingan Teknis
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DAPIL	:	Daerah Pilih/Pemilihan
KUA	:	Kebijakan Umum APBD
KEMENDAGRI	:	Kementerian Dalam Negeri
LKPJ	:	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
MUSRENBANG	:	Musyawaharah Rencana Pembangunan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PAP	:	Pajak Air Permukaan
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
RDP	:	Rapat Dengar Pendapat
RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RANPERDA	:	Rancangan Peraturan Daerah
RRI	:	Radio Republik Indonesia
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RAKER	:	Rapat Kerja
RAPUR	:	Rapat Paripurna
SDM	:	Sumber Daya Manusia

SETWAN : Sekreatriat Dewan
TATIB : Tata Tertib
TVRI : Televisi Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, J. W., & Báez, J. C. (2020). *30 essential skills for the qualitative researcher*. Sage Publications.
- Enders, C. K. (2022). *Applied missing data analysis*. Guilford Publications.
- Jelatu, H., & Jewaru, M. (2024). *Optimalisasi Kinerja Organisasi Sinergi Fasilitas Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Kerja*. Amerta Media.
- Miner, J. B. (2015). *Organizational behavior 1: Essential theories of motivation and leadership*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Sumual, L. P., Handayani, M. A., Chandra, F., Arifin, H. A., Mardika, N. H., Supangat, S., ... & Saptaria, L. (2025). *SDM dan budaya kerja: Sinergi untuk meningkatkan kinerja organisasi*. CV. Gita Lentera.
- Tisdell, E. J., Merriam, S. B., & Stuckey-Peyrot, H. L. (2025). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Wilson, B. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuningsih, S. (2021). *Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi*. Penerbit NEM.

Jurnal:

- Aquarini, A., & Lisnawati, L. (2024). Analisis Perbandingan Literasi Digital dan Kompetensi Profesional ASN Berdasarkan Gender di Kalimantan Tengah. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 140-161.
- Bouncken, R. B., Czakon, W., & Schmitt, F. (2025). Purposeful sampling and saturation in qualitative research methodologies: recommendations and review. *Review of Managerial Science*, 1-37. <https://doi.org/10.1007/s11846-025-00881-2>
- Cahyati, I. K., & Adelia, M. (2024). Kepemimpinan dan Budaya Organisasi: Kunci Optimalisasi Kinerja di Tempat Kerja. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 14-14. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2550>
- Creswell, C., Leigh, E., Larkin, M., Stephens, G., Violato, M., Brooks, E., ... & Clark, D. M. (2021). Qualitative interviews: Approach, design, sample and analysis. In *Cognitive therapy compared with CBT for social anxiety disorder in adolescents: A feasibility study*. NIHR Journals Library.

- Djasuli, M., & Risqillah, N. (2025). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 7(2), 115-128. <https://doi.org/10.21107/jhdy.v7i2.3116>
- Entjaurau, J., Mamonto, F. H., & Tarore, S. V. (2024). Implementasi Kebijakan Program E-Aspirasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4655-4668. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9117>
- Erdiyansyah, E., & Afandi, M. (2025). Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 2747-2756. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18765>
- Ermayanti, D. (2015). Pengukuran Kinerja SDM *Metode Human Resources Scorecard* Sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 57-63. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v15i1.176>
- Frain, J. (2025). Qualitative Research. *ABC of Evidence-Based Healthcare*, 39-46. <https://doi.org/10.1002/9781394219346.ch5>
- Firmansyah, A. (2024). Akuntabilitas Publik dan Kinerja Anggota DPRD. *Jurnal Tata Kelola*, 12(1), 45-58. <https://doi.org/10.21831/jtk.v12i1.4567>
- Farasi, S. N., Puspitasari, R. P., & Wildan, M. A. (2025). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 652-658. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6537>
- Harmi, H., Syahsudarmi, S., & Munthe, R. A. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Komunikasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Intervening. *Amnesia (Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 3(1), 51-61. <https://doi.org/10.61167/amnesia.v3i1.153>
- Hirose, M., & Creswell, J. W. (2023). Applying core quality criteria of mixed methods research to an empirical study. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(1), 12-28. <https://doi.org/10.1177/15586898221086346>
- Hall, S., & Liebenberg, L. (2024). Qualitative description as an introductory method to qualitative research for master's-level students and research trainees. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241242264>
- Huang, H., Cheng, Y., Dong, W., Gartner, G., Krisp, J. M., & Meng, L. (2024). Context modeling and processing in Location Based Services: research challenges and opportunities. *Journal of Location Based Services*, 18(4), 381-407. <https://doi.org/10.1080/17489725.2024.2306349>

- Hidayat, R., & Fitri, S. (2022). Kinerja DPRD dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 201-215. <https://doi.org/10.31289/jian.v10i2.6789>
- Karly, A., & Setiawan, R. (2024). Strategi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja aparatur di sekretariat dprd kota pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(1), 138-149. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i1.131>
- Khaeruman, K., Mukhlis, A., Bahits, A., & Tabroni, T. (2024). Strategi perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa*, 7(1), 41-50. <https://dx.doi.org/10.48181/jrbmt.v7i1.23910>
- Kaloyanova, K., Kovacheva, Z., & Naydenova, I. (2024). Secondary use of data—Practical and research data aspects. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3094, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0210156>
- Karunarathna, I., Gunasena, P., Hapuarachchi, T., & Gunathilake, S. (2024). Comprehensive data collection: Methods, challenges, and the importance of accuracy. *Uva Clinical Research*, 1-24. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13134.47689>
- Kurniawan, D., (2023). Digitalisasi Parlemen di Era 4.0. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15(3), 310-325. <https://doi.org/10.20473/jpp.v15i3.8912>
- Lim, W. M. (2025). What is qualitative research? An overview and guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199-229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Li, Y., & Zhang, S. (2022). Qualitative data analysis. In *Applied Research Methods in Urban and Regional Planning* (pp. 149-165). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93574-0_8
- Lestari, P., (2021). Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD. *Jurnal Ekonomi Politik*, 8(1), 22-34. <https://doi.org/10.14710/jep.8.1.22-34>
- Mulyadi, A. (2023). Efektivitas Komisi DPRD dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 150-165. <https://doi.org/10.31258/jkp.14.2.150-165>
- Nugroho, B. S. (2025). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 1040-1055. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4572>
- Nugroho, R. A., Subiyanto, D., & Kusuma, N. T. (2024). Pengaruh Servant Leadership, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pegawai Sekretariat DPRD DIY. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, 11(1), 23-34. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v11i1.5313>
- Priyodigdo, A. A., Saipul, S., & Aquarini, A. (2025). Implementasi Standar Operasional Prosedur untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah:

- Implementation of Standard Operating Procedures to Improve Public Service Performance: Case Study at the Central Kalimantan Provincial Housing, Settlement and Land Office. *Anterior Jurnal*, 24(Special-1), 22-27.
- Pratama, B. (2025). Rekrutmen Politik dan Kualitas Legislator. *Jurnal Legislatif*, 6(1), 12-25. <https://doi.org/10.20961/jl.v6i1.2345>
- Pratiwi, S. (2020). Analisis Fungsi Legislasi DPRD. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 18(2), 112-126. <https://doi.org/10.56444/jhd.v18i2.1567>
- Putri, L., & Sari, K. (2023). Evaluasi Pembentukan Perda di Indonesia. *Jurnal Riset Hukum*, 5(4), 400-415. <https://doi.org/10.29313/jrh.v5i4.7890>
- Pratt, M. G. (2025). On the evolution of qualitative methods in organizational research. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 12(1), 109-131. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-111722-032953>
- Rahmi, H. B. (2024). Strategi Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Kepemimpinan untuk Optimalisasi Kinerja Karyawan. *Produktif: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 3(1), 39-48. <https://doi.org/10.37481/jko.v3i1.130>
- Ramadhan, M. (2025). Digitalisasi Arsip Persidangan pada Sekretariat DPRD. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 11(1), 15-30.
- Rahayu, M. (2022). DPRD dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 77-89. <https://doi.org/10.35718/jpd.v9i1.567>
- Ramadhan, F. (2024). Integritas dan Kinerja Legislatif. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 11(2), 188-200. <https://doi.org/10.33701/jep.v11i2.3456>
- Rizqi, M., Heryanti, A. D., Said, Y., Hidayatun, N., & Wijaya, M. A. (2025). Tinjauan Kuantitatif Tentang Faktor-Faktor Kepemimpinan Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2. D), 182-190. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11621>
- Russ, E., Petrakis, M., Whitaker, L., Fitzroy, R., & Short, M. (2025). Co-operative inquiry: Qualitative methodology transforming research 'about'to research 'with'people. *Qualitative Research*, 25(1), 43-64. <https://doi.org/10.1177/14687941241234272>
- Sandi, J. R. A., & Satriawan, B. H. (2024). Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 27-34. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3652>
- Samad, M. A., & Aisyah, N. (2019). Kajian Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 9-22. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.11>
- Santoso, T. (2023). Komitmen Organisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 17(1), 55-68.
<https://doi.org/10.24912/jmsdm.v17i1.6789>
- Saputra, A., & Nurani, T. (2021). Kompetensi dan Kinerja DPRD. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 130-145. <https://doi.org/10.31289/jap.v19i2.4321>
- Sari, I., (2025). Sinergitas Eksekutif-Legislatif. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 13(1), 30-45. <https://doi.org/10.33701/jmp.v13i1.9012>
- Takona, J. P. (2024). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Quality & Quantity, 58(1), 1011-1013. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2>
- Utami, N., & Hakim, L. (2024). Gender dan Kebijakan Publik di DPRD. Jurnal Studi Gender, 16(2), 210-225. <https://doi.org/10.21580/jsg.v16i2.5678>
- Yulianti, Y., & Komalawati, E. (2024). Pengaruh Koordinasi, Etika Kerja, dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai di Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 11(2), 215-220. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4189>
- Valentina, E., & Setyawan, A. (2025). Peran Budaya Organisasi Dalam Pengaruh Kepemimpinan Transformasi dan Inovasi Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi. Equilibrium, 22(01), 53-64. <https://doi.org/10.25134/tqb1pp34>
- Vuong, T. D. N., & Nguyen, L. T. (2022). The key strategies for measuring employee performance in companies: a systematic review. Sustainability, 14(21), 14017. <https://doi.org/10.3390/su142114017>
- Wijanarko, A. (2020). Analisis Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. JI@ P, 9(1). <https://doi.org/10.33061/jp.v9i1.3558>
- Wibowo, F., & Tjahjono, H. K. (2023). Optimalisasi kinerja organisasi melalui gaya kepemimpinan yang efektif untuk mencapai kepuasan kerja: sebuah studi literatur. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi*, 129-142. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.929>
- Widodo, J. (2023). Evaluasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, 10(1), 12-25. <https://doi.org/10.35968/jipi.v10i1.442>
- Wijaya, H. (2022). Politik Anggaran Masa Pandemi. Jurnal Keuangan Daerah, 7(3), 142-158. <https://doi.org/10.22202/jkd.v7i3.4561>

Peraturan Perundang-Undangan/ Produk Hukum:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan/ Dokumen:

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). Laporan Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 5 Tahun (2024-2029).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertanggung jawab atas urusan tugas tertentu. Salah satunya adalah Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang membidangi urusan Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi urusan Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan, memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam bidang Pemerintahan Komisi I memiliki peran terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama terhadap Mitra Kerja Komisi I (Dinas, Badan, Kantor, dan atau Lembaga Teknis lainnya). Adapun peran tersebut meliputi: (1) Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah; (2) Pengawasan Kinerja Pemerintah

Daerah; dan (3) Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pemerintah Daerah.

Dalam bidang hukum, Komisi I memiliki peran penting untuk memastikan kepastian hukum di tingkat daerah terutama terhadap Mitra Kerja Komisi I (Dinas, Badan, Kantor, dan atau Lembaga Teknis lainnya). Peran ini termasuk: (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan (2) Pengawasan Penegakan Hukum. Adapun dalam bidang keuangan, Komisi I memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah, penerimaan dan pengeluaran, pajak, retribusi, serta aset daerah dilakukan dengan baik dan optimal terutama terhadap Mitra Kerja Komisi I. Peran ini termasuk: (1) Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pemerintah Daerah; dan (2) Pengawasan Anggaran Pemerintah Daerah.

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, memegang peranan utama dalam penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah, pengawasan Pemerintah Daerah, dan pembahasan dan penetapan anggaran Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi. Kinerja yang optimal salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas aktor, dimana kegagalan sering kali berujung pada lemahnya penyelenggaraan pemerintahan (Djasuli & Risqillah, 2025). Dalam konteks ini, Komisi I menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa setiap penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah, pengawasan Pemerintah Daerah, dan pembahasan dan penetapan anggaran Pemerintah Daerah telah selaras dengan koridor regulasi yang berlaku dan kebutuhan prioritas daerah.

Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya diukur dari banyaknya pertemuan rapat yang dilaksanakan, tetapi juga dari substansi hasil lkerja yang berdampak pada pembangunan daerah. Widodo (2023) dalam studinya menyebutkan bahwa evaluasi kinerja DPRD merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah, tantangan kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sering kali berhadapan dengan kompleksitas birokrasi dan keterbukaan informasi publik yang belum sepenuhnya optimal, sehingga efektivitas kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah penting untuk dianalisis

secara mendalam.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di berbagai daerah, menunjukkan beberapa permasalahan dan tantangan yang sering muncul dan mengindikasikan pentingnya mendorong kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di berbagai daerah, yang saat ini dapat bermanifestasi dalam beberapa aspek, antara lain: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Sistem dan Prosedur Kerja yang Belum Efisien; (3) Koordinasi dan Komunikasi Internal/Eksternal; dan (4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana; (5) Dukungan Anggaran (Harmi , 2025; Nugroho, 2025; Nugroho, 2024; Wijanarko, 2020; Entjaurau , 2024; Aquarini, A., & Lisnawati, L., 2024).

Dalam hal ini jika kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kurang optimal, maka akan berimplikasi pada berbagai hambatan, seperti pada penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah, pengawasan Pemerintah Daerah, dan pembahasan dan penetapan anggaran Pemerintah Daerah (Priyodigdo, A. A., Saipul, S., & Aquarini, A., 2025). Sehingga kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang komprehensif baik secara administratif, substantif, dan maupun teknis menjadi krusial karena secara langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam merumuskan kebijakan daerah, mengawasi jalannya Pemerintahan, serta menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Sandi & Satriawan, 2024).

Implikasi lainnya adalah potensi menurunnya kualitas produk legislasi, kurang optimalnya fungsi pengawasan terhadap eksekutif, serta lambatnya respons terhadap aspirasi masyarakat (Sandi & Satriawan, 2024). Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan, dan lebih jauhnya akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Erdiyansyah, 2025; Samad , 2019; Yulianti, 2024).

Analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan, menghadirkan fokus permasalahan yang belum pernah

dilakukan penelitian sebelumnya, serta memberi ruang *gap research* bagi penulis untuk melihat bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.

Mengingat pentingnya kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan berfokus pada ***"Analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan"***. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan saran dan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, demi terwujudnya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih profesional dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan ?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

1. Memberikan kontribusi akademis dan memperkaya khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Program Studi Administrasi Publik, serta dapat menambah wawasan dalam analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan, dan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan kajian yang lebih dalam di masa yang akan datang.
2. Menjadi sumbangsih pemikiran dan bahan pertimbangan bagi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kedepan terkait kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.

b. Praktis

1. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.